CATRA RESEARCH INSTITUTE
ISSN - 2809-7947 (PRINT)
ISSN - 2829-0771 (ONLINE)
AKUNTANSI HUMANIORA
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
PUBLISHING KSI
Indexed By : GARUDA, Google Scholar, doi Crossref, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, ROAD, ISJD, Indonesia OneSearch, EBSCO

UPAYA SINKRONISASI KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) DENGAN PROGRAM MAGANG INDUSTRI GUNA MENDORONG EFISIENSI KINERJA

Umi Fatimatur ROSYIDAH[1], Hanifah ZUNIATIN[2], Frida Fanani ROHMA[3]
[1,2,3]Accounting Department, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
Corresponding author: Frida Fanani ROHMA
E-mail: frida.frohma@trunojoyo.ac.id

Info Artikel:

Dikirim: 2023-03-18	Direvisi: 2023-04-14	Diterima: 2023-06-15
Vol: 2	Number: 2	Hal: 36 - 41

Kata Kunci:
Efesiensi, Kinerja, Magang, Pemerintah

Abstract:
Pencapaian kinerja organsiasi pemerintah daerah dapat tercapai dengan adanya dukungan kapasitas sumberdaya manusia yang memadai. Kapasitas sumberdaya manusia dapat ditingkatkan melalui optimalisasi dan sinkronisasi antara praktik dan teori. Lebih dari itu, sinkronisasi program antara praktik dan teoritis berpotensi untuk meningkatkan efisiensi kinerja pemerintahan. Metode kegiatan ini dilaksanakan dan terintegrasi dengan program magang industry internal 2023 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bpjonegoro selama 5 bulan. Pelaksanaan magang industry yang mencakup beberapa aktivitas yaitu: pengerjaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2023, input Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Kode Billing data pajak langsung (LS), menulis surat masuk dan surat keluar, penerbitan Surat Perintah Percairan Dana (SP2D), input data Laporan Kas Harian Kabupaten Bojonegoro, melakukan regristasi SP2D Gaji, TPP, dan Non Gaji. Hasil kegiatan ini adalah BPKAD Kabupaten Bojonegoro dapat melakukan efisiensi kinerja dengan ketercapaian terselesaikan pekerjaan menjadi lebih tepat waktu. Lebih dari itu, efisiensi kinerja terjadi dengan melakukan doublecheking SP2D sehingga akurasi dan sikronisasi data pencairan anggaran menjadi semakin presisi.

Cite This as: ROSYIDAH, U.F., ZUNIATIN, H., ROHMA, F.F. (2023). "Upaya Sinkronisasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dengan Program Magang Industri Guna Mendorong Efisiensi Kinerja." Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat., 2 (2), 36 - 41.

PENDAHULUAN

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara yang menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan keuangan negara (Rohma, 2023). Kebijakan ekonomi yang terus menerus mengalami perkembangan yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang memiliki tujuan memberikan pedoman pokok dalam penyusunan laporan keuangan baik kepada pemerintah pusat melakukan perbaikan guna memaksimalkan pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah mempunyai wewenang ataupun otonom dalam mengelola seluruh sektor pembangunan di wilayah kabupaten atau kota tersebut (Rohma et al., 2023)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah bertujuan untuk

CATRA RESEARCH INSTITUTE
ISSN - 2809-7947 (PRINT)
ISSN - 2829-0771 (ONLINE)
PUBLISHING KSI
AKUNTANSI HUMANIORA
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Indexed By : GARUDA Google doi Crossref INDEX COPERNICUS ROAD ISJD OneSearch EBSCO

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan lebih berdaya saing dengan menganut prinsip demokrasi, kesetaraan,dan keadilan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia melalui otonomi yang luas.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD. Terdapat aspek - aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah legalitas pendapatan dan pengeluaran daerah, pengelolaan keuangan yang baik, perlindungan aset fisik dan keuangan, serta pencegahan pemborosan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tertib.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Analisis efektivitas dan efisiensi sangat berguna dalam menilai kinerja keuangan pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dikatakan efektif apabila penggunaan dan pemanfaatan anggaran telah mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan, serta dapat dikatakan efisien apabila penggunaan dan pemanfaatan dan dapat menghasilkan output secara maksimal. Sehingga dapat meminimalisir pengeluaran yang tidak penting dan terhindar dari terjadinya pemborosan dalam penggunaan dan pemanfaatan anggaran.

Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global memiliki andil dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan demikian untuk meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro harus dengan mempertimbangkan faktor-faktor kelemahan (Weakness) dan memanfaatkan kekuatan (Strenght) dari faktor internal yang ada untuk dapatnya memanfaatkan peluang (Opportunity) dan dapat mengatasi ancaman (Threat) yang mungkin terjadi (Rohma, 2019; Halim & Kusufi, 2015; Shohib et al., 2023). Lebih dari itu, peran kualitas sumberdaya manusia memiliki peran penting dalam menjelaskan peran organisasi (Kusufi et al., 2020; Rohma & Novitasari, 2022).

Magang industri merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong kualitas sumberdaya manusia yang relevan dengan kebutuhan praktis. Lebih dari itu, sinkronisasi teori dan praktik berpotensi membuat kualitas sumberdaya manusia menjadi lebih baik. Magang Industri merupakan bentuk perkuliahan melalui kegiatan bekerja secara langsung di dunia kerja. Lebih dari itu, adanya program intersip juga dapat membantu organisasi mitra untuk mencapai efisiensi kerja dengan terselesaikannya tuga secara tepat waktu dengan adanya tambahan sumberdaya magang intership dalam melaksanakan aktivitas organisasi.

METODE

Kegiatan pengabdan yang dilaksankaan, terintegrasi dengan program magang industri internal 2023 di BPKAD Kabupaten Bojonegoro dari oleh mahasiswa dan dosen program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Tahapan yang dilasanakan mencakup beberapa bagian. Pertama, melakukan persiapan dengan mengikuti pembekalan magang industri secara online di Zoom Apps. Kedua, melakukan koordinasi teknis bersama dengan mitra magang untuk mengetahui pembagian tupoksi selama beraktifitas. Ketiga, Pelaksanaan magang industry yang mencakup beberapa aktivitas yaitu: pengerjaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2023, input Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Kode Billing data pajak langsung (LS), menulis

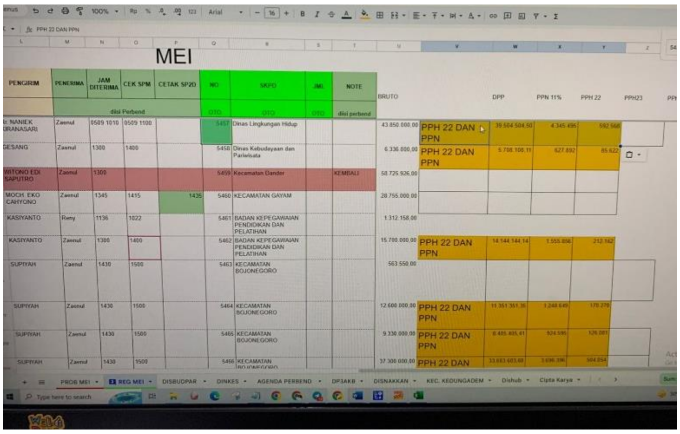
CATRA RESEARCH INSTITUTE
ISSN - 2809-7947 (PRINT)
ISSN - 2829-0771 (ONLINE)
AKUNTANSI HUMANIORA
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
PUBLISHING KSI
Indexed By :
GARUDA Google doi Crossref INDEX COPERNICUS ROAD ISJD OneSearch EBSCO

surat masuk dan surat keluar, penerbitan Surat Perintah Percairan Dana (SP2D), input data Laporan Kas Harian Kabupaten Bojonegoro, melakukan regristasi SP2D Gaji, TPP, dan Non Gaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan aktivitas pengabdian yang terintegrasi denfan magang industri di Kantor BPKAD Kota Bojonegoro yang selama beraktivitas di lapangan dibantu oleh para karyawan Kantor BPKAD Kota Bojonegoro bagian Perbendaharaan untuk dapat memahami aktivitas dalam melaksanakan Magang Industri. Petugas BPKAD Bojoengoro memberikan arahan dan bimbingan kepada praktikan dalam melaksanakan kegiatan.

Aktivitas pertama pada bagian perbedaharaan yaitu mengoreksi dan menginput Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke dalam register. Pertama mahasiswa diajarkan terlebih dahulu tentang SP2D yang awalnya berupa Surat Perintah Membayar (SPM), ada banyak bentuk SP2D seperti UP/GU/TUP/UP/PTUP/GU Nihil/LS/IB/KBC dan yang sering diajarkan kepada mahasiswa adalah SP2D LS/UP/GU. SPM yang diterima dari dinas, badan dan kecamatan terkait kemudian dikoreksi terlebih dahulu,jika sudah benar maka bagian non gaji menerbitkan SP2D aktivitas tersebut disajikan gambar 1. Jika SP2D sudah diserahkan kepada mahasiswa kemudian diinput kedalam register dan dipisahkan antara SP2D yang akan diserahkan kepada pihak bank jatim dan SP2D arsip untuk disimpan oleh pihak BPKAD.

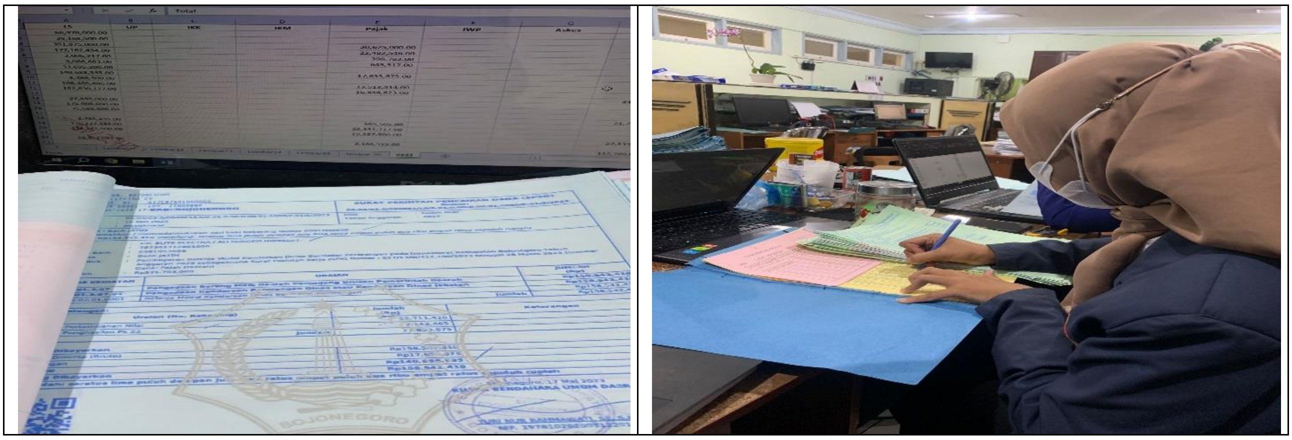


Sumber: BPKAD Bojonegoro, 2023

Gambar 1. Register Perbendaharaan

Aktivitas kedua, melakukan input Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang sudah dipindah bukukan oleh bank yang kemudian diinput dengan mengelompokkan antara LS, JKK,JKM,Pajak, IWP, Askes,GU,UP. Jika sudah kemudian diinput kedalam Laporan Kas Harian (LKH) Kabupaten Bojonegoro.

CATRA RESEARCH INSTITUTE
ISSN - 2809-7947 (PRINT)
ISSN - 2829-0771 (ONLINE)
AKUNTANSI HUMANIORA
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
PUBLISHING KSI
Indexed By :
GARUDA Google doi Crossref INDEX COPERNICUS ROAD ISJD Indonesia OneSearch EBSCO



Sumber: BPKAD Bojonegoro, 2023

Gambar 2. Surat Perintah Pencairan Dana

`

Aktivitas ketiga, melakukan input data Laporan Kas Harian (LKH) Kabupaten Bojonegoro yang sudah diserahkan kepada BPKAD oleh Bank Jatim, Selanjutnya tugas lainnya yaitu membuat nota debet, kredit, dan billyet sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS).



Sumber: BPKAD Bojonegoro, 2023

Gambar 3. Laporan Kas Harian

Aktivitas keempat, pada saat pelaksanaan bimtek mahasiswa membantu menyiapkan materi terkait Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan membagikan materi tersebut kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aktivitas tersebut dilakukan sesuai dengan konsep teoritis yang diperolah selama beraktivitas di kampus.

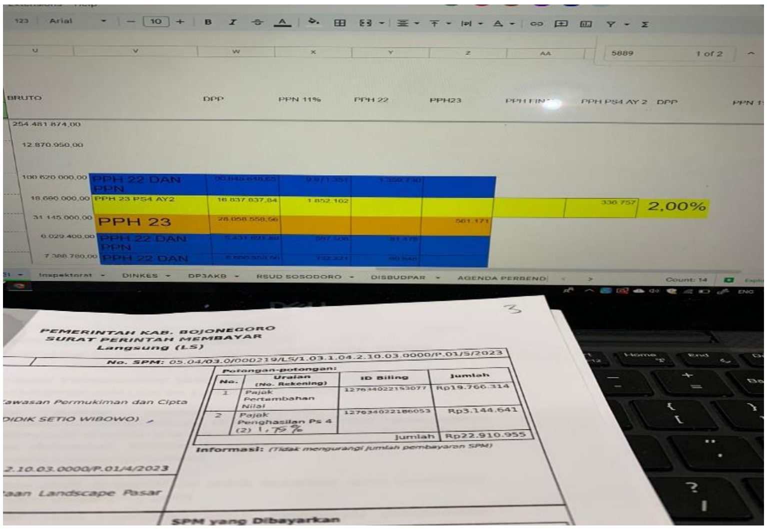
CATRA RESEARCH INSTITUTE
ISSN - 2809-7947 (PRINT)
ISSN - 2829-0771 (ONLINE)
AKUNTANSI HUMANIORA
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
PUBLISHING KSI
Indexed By :
GARUDA Google doi Crossref INDEX COPERNICUS ROAD ISJD Indonesia OneSearch EBSCO



Sumber: BPKAD Bojonegoro, 2023

Gambar 4. Aktivitas Bimt

Aktivitas kelima, pada program abdimas yang tersinkronisasi dengan magang industri juga melibatkan mahasiswa untuk crosscheck pajak pada SPM & SP2D menggunakan rumus yang sudah ada di dalam google drive. Misalnya pajak PPH 21, PPH 23, PPH 22, PPH & PPN 22, PPH & PPN 23, PPH & PPN Pasal 4 (2). Jadi di google drive tersebut jika di salin rumus PPH & PPN maka akan langsung muncul pajaknya, maka jika pajak tersebut sesuai SP2D akan disetujui oleh pihak BUD dan jika tidak sesuai antara pajak pada berkas SPM dan rumus di google drive maka SPM berhak ditolak oleh pihak BUD BPKAD Bojonegoro.



Sumber: BPKAD Bojonegoro, 2023

Gambar 4. Perpajakan

Pada aktivitas pertama persiapan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/GU/TU/LS di instansi magang industri dilaksanakan sesuai dengan Standar Operating Prosedur yang harus dipenuhi SKPD Kabupaten Bojonegoro. Pertama, sebelum membuat SPM,Bendahara atau PPTK SKPD harus membuat SPP terlebih dahulu. Kedua, setiap pengajuan SP2D UP/GU/TU/LS gaji atau non gaji harus disertai SPM dan kelengkapan lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Ketiga, semua kelengkapan SPM yang diajukan diteliti oleh

CATRA RESEARCH INSTITUTE
ISSN - 2809-7947 (PRINT)
ISSN - 2829-0771 (ONLINE)
AKUNTANSI HUMANIORA
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
PUBLISHING KSI
Indexed By : GARUDA Google doi Crossref INDEX COPERNICUS ROAD ISJD OneSearch EBSCO

Kuasa BUD. Keempat, apabila SPM dinyatakan tidak lengkap, Kuasa BUD menerbitkan surat penolakan SP2D. Surat penolakan SP2D ini diserahkan kepada Pengguna Anggaran/KPA agar dilakukan penyempurnaan SPM. Kelima, Bila SPM dinyatakan lengkap maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D. Keenam, SP2D diserahkan kepada Bank dan Pengguna Anggaran/KPA dengan tanda terima. Ketujuh, SP2D diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran oleh Pengguna Anggaran/PA untuk dicatat pada dokumen penatausahaan. Kedelapan, kuasa BUD mencatat SP2D dan Nota Debet (dari Bank) pada dokumen Penatausahaan (Buku Kas Pengeluaran). Pada organisasi mitra pernah kehilangan data arsip Surat Perintah Pencairan Dana. Selain itu, kurangnya teliti Instansi terkait tentang besaran pajak dalam bentuk persen dari berkas SPM dan peristiwa tersebut membuat Mahasiswa kesulitan dalam menghitung PPN dan PPH dari Instansi terkait serta sering terjadi ketidaklengkapan lampiran berkas SPM yang membuat SP2D terlambat dicairkan. Dengan demikian, diperlukan administrasi dokumen sesuai arsip untuk setiap SP2D. Selain itu, agar SP2D tidak mengalami keterlambatan atau pembatalan pihak BPKAD menghubungi Instansi terkait agar segera melengkapi berkas SPM yang kurang seperti lampiran dan menulis nominal besaran persen pajak agar memudahkan pihak BPKAD dalam mengecek dan menghitung PPN dan PPh dari berkas SPM tersebut.

KESIMPULAN

Aktivitas magang industri yang dilasanakan di BPKAD Bojonegoro yang dilaksanakan dalam bentuk Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2023, input Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Kode Billing data pajak langsung (LS), pengurusan proses Penerbitan Surat Perintah Percairan Dana (SP2D), input data Laporan Kas Harian Kabupaten Bojonegoro serta melakukan Registrasi SP2D Gaji, TPP, dan Non Gaji. Aktivitas yang dilakukan di BPKAD Bojoengoro diharapkan mampu mendorong efisiensi kinerja BPKAD dan aktivitas pekerjaan menjadi lebih tepat waktu dengan bantuan sumberdaya manusia.

REFERENSI

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Kusufi, M. S., Rohma, F. F., & Muhammad, E. (2020). Pengaruh Horizon Skema Turnamen dan Frekuensi Publikasi Informasi Relatif terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Kajian Akuntansi, 4*(1), 1-12.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 93 Tahun 2021 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja BPKAD Kabupaten Bojonegoro*.

Rancangan akhir Renstra BPKAD Tahun 2024-2026. https://bpkad.bojonegorokab.go.id/

Rohma, F. F. (2019). Analisis biaya dan manfaat aliran kas investor: telaah literatur kewajaran dari nilai wajar. *Jurnal Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi (PETA*), *4*(2), 49-65.

Rohma, F. F. (2023). Efektivitas Informasi dan Komunikasi dalam Memitigasi Tendensi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 12*(1): *1-13*

Rohma, F. F., & Novitasari, I. (2022). Portrait of Performance Measurements: A Case Study in Micro Organization. *Journal Of Economics, Management, and Business Research*, *3*(2).

Rohma, F. F., Shofiyah, I., & Junaedi, A. S. (2023). The Effect of Tournament Horizon, Faultline and Group Performance Relationships under Decentralized System. *Journal of Indonesian Economy and Business*, *38*(1), 62-80.

Shohib, M., Khrisna, H., & Hudriyah, M. (2023). Pengembangan UMKM Melalui Perjanjian Kerja Dan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis E-Commerce. Akuntansi Dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 1–5.